

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang merata lewat proses pembangunan ekonomi sesuai dengan sektor-sektor ekonomi dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah yang efisien dan efektif dengan tujuan mencapai suatu daerah yang mandiri dan kemajuan merata di seluruh pelosok negara Indonesia (Ferry, 2023). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya merupakan upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan tingkat ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Permasalahan ketimpangan ini biasanya terjadi pada negara miskin dan berkembang (Farhan & Sugianto, 2022).

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan pendapatan relatif warga negara berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah (Todaro, 2003). Dampak dari adanya ketimpangan pendapatan dapat mempengaruhi kelangsungan pembangunan khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Masalah ketimpangan dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang

tinggi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata untuk mengurangi ketimpangan baik diantara penduduk maupun wilayah (Ferry, 2023).

Pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara yang semakin terbagi dan tidak setara dalam banyak hal. Terdapat kesenjangan pendapatan yang semakin lebar antara 10 persen warga terkaya dan populasi sisanya, didorong oleh banyak jenis ketimpangan di Indonesia. Masyarakat terbagi menjadi orang berpunya dan tidak berpunya bahkan sebelum dilahirkan. Hanya sebagian anak-anak terlahir sehat dan tumbuh dengan baik pada tahun-tahun pertama mereka. Demikian pula hanya sebagian anak mampu bersekolah dan mengenyam pendidikan berkualitas. Ini berarti sebagian besar tidak dapat memasuki lapangan kerja dengan keterampilan yang tepat sesuai kebutuhan ekonomi modern dan dinamis. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. Banyak keluarga tidak memiliki akses ke jaring pengaman sosial yang dapat melindungi mereka dari berbagai guncangan yang melanda dalam hidup. Sejumlah kecil orang Indonesia yang beruntung memiliki akses ke aset keuangan dan fisik (seperti tanah dan properti) yang membuat kekayaan mereka meningkat seiring waktu. Kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk uang maupun aset fisik, dan melalui akses lebih besar pada kesehatan dan pendidikan yang lebih baik. Alhasil, ketimpangan semakin berlipat ganda dan semakin lebar seiring berjalannya waktu (World Bank, 2016).

Ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari angka rasio gini atau indeks gini. Rasio gini berkisar dari angka 0 sampai angka 1. Ketimpangan pendapatan antar pulau di Indonesia rata-rata masuk dalam kategori jenis ketimpangan sedang yang diukur dari rasio gini. Saat ini, pulau jawa memberikan kontribusi paling besar diantara pulau lainnya yakni mencapai 58,75% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya tingkat urbanisasi penduduk ke kota besar akibat kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Namun yang menjadi permasalahan perpindahan penduduk ini tidak dimbangi dengan kemampuan atau keahlian yang memadai sehingga kualitas sumber daya manusia yang rendah akan berdampak pada angka pengangguran yang tinggi (Farhan & Sugianto, 2022).

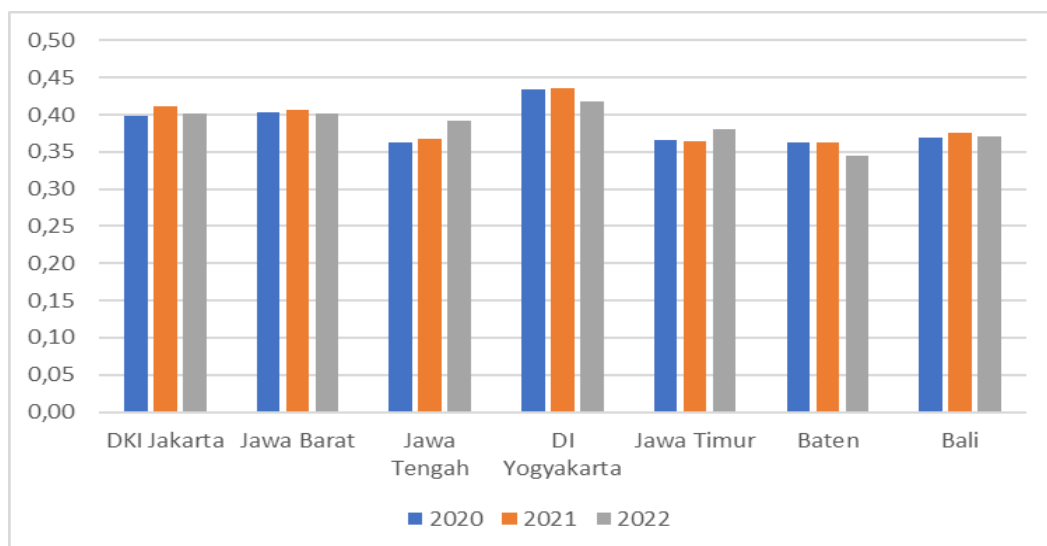
**Tabel 1.1 Data Rasio Gini Indonesia dengan Provinsi di pulau Jawa dan Bali Tahun 2021-2022**

	2021	2022
Indonesia	0,384	0,381
DKI Jakarta	0,41	0,402
Jawa Barat	0,41	0,402
Jawa Tengah	0,37	0,392
DI Yogyakarta	0,44	0,418
Jawa Timur	0,36	0,381
Baten	0,36	0,344
Bali	0,38	0,371

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data diatas terdapat beberapa provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang angka rasio gini nya di atas rata-rata rasio gini nasional. Angka rasio gini pada, DKI Jakarta, Jawa barat, dan DI Yogyakarta setiap tahun selalu diatas rasio gini nasional. Provinsi lainnya seperti Bali, Jawa tengah, Jawa timur, dan Banten

meskipun rasio gini berada dibawah rasio gini nasional akan tetapi angka tersebut masih cukup besar dan mendekati rasio gini rata-rata nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.1 Data Rasio Gini Provinsi di Pulau Jawa dan Bali  
Tahun 2020-2022 (Persen)**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 3 tahun terakhir provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan angka ketimpangan pendapatan paling tinggi di pulau jawa dan bali dengan angka rasio gini selalu diatas 0,40. Selanjutnya, DKI Jakarta dan Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan rata-rata ketimpangan pendapatan paling tinggi selama 3 tahun terakhir di antara provinsi lainnya di pulau Jawa dan Bali. Ini menunjukkan bahwa provinsi sebagai ibu kota DKI Jakarta menjadi wilayah

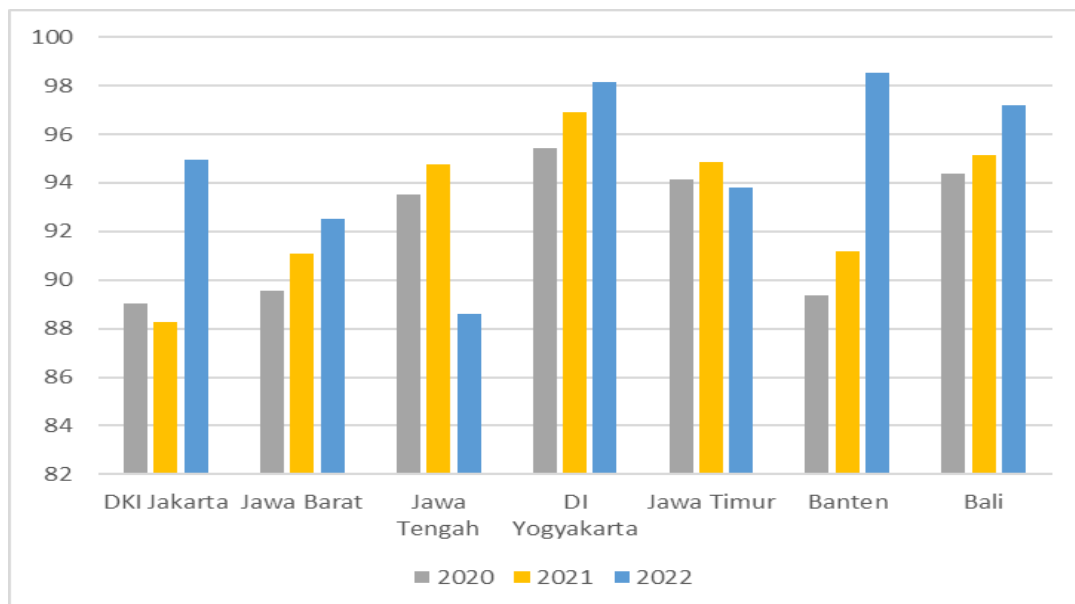
Ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa maupun di kota yang sudah seharusnya segera diatasi mengingat jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat. Peningkatan jumlah

penduduk akan menghasilkan jumlah angkatan kerja yang tinggi, tentu perlu adanya perluasan lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap angkatan kerja. Banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah dapat mencerminkan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk setiap daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi dituntut untuk melakukan pengendalian yang baik sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menambah angka jumlah penduduk dan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, jumlah penduduk yang tinggi meski bukan penyebab utama keterbelakangan, merupakan faktor yang turut berkontribusi terhadap lambatnya pembangunan ekonomi di negara tertentu maupun di suatu wilayah (Feni Nursetia, 2013). Jumlah penduduk bagi pemerintah daerah perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan sekaligus juga beban pembangunan. Sebagai aset modal pembangunan apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian sehingga akan meningkatkan produksi nasional.

Dalam penelitian Musfidar (2012) di Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa jumlah penduduk yang berumur produktif baik yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja, akan meningkatkan angka ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan proporsi jumlah penduduk yang bekerja masih belum merata di sejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa. Mereka yang bekerja di perkotaan memiliki

tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan (Adipuryanti & Sudibia, 2015).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.2 Data Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi di Pulau Jawa Bali Tahun 2020-2022 (Persen)**

Gambar 1.2 menunjukkan pada tahun 2022 provinsi Banten menjadi provinsi dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja paling tinggi 98,53%. Diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta sebesar 98,15%, kemudian provinsi Bali sebesar 97,18%, DKI Jakarta sebesar 94,95%, Jawa timur sebesar 93,81%, Jawa barat sebesar 91,23%, dan provinsi Jawa tengah dengan penyerapan tenaga kerja paling rendah di tahun tahun 2022 sebesar 88,59%. Berdekatan dengan daerah ibu kota rupanya berdampak secara langsung pada provinsi Banten yang dibuktikan dengan terus terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam 3 tahun terakhir.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam

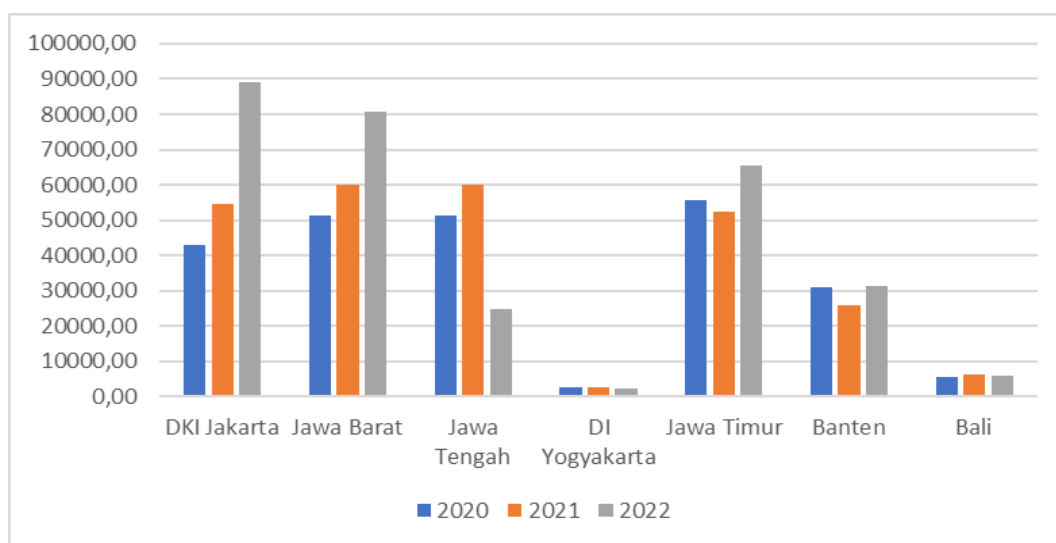
penelitiannya (Astuti & Hukom, 2023) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh positif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian Pramarta (2021) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara penyerapan tenaga kerja dengan ketimpangan pendapatan.

Selain faktor ketersediaan lapangan pekerjaan, ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang bisa berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi dapat memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Karena dengan tingginya investasi disuatu daerah, pendapatan yang diterima masyarakat pun akan naik. Dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat maka pendapatan akan membaik, sehingga semakin berkurang pula ketimpangan pendapatan (Et & Sinica, 2019).

Investasi merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Apabila investasi pada suatu daerah bertambah maka hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru. Investasi merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal dan meraih keuntungan pada yang akan datang.

Investasi pada suatu wilayah akan membawa dampak *multiplier effect* bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi wilayah, dengan adanya investasi terdapat beberapa hal yang diuntungkan seperti terbukanya lapangan pekerjaan, membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, serta dapat memajukan wilayah melalui penggalan potensi ekonomi wilayah yang semakin

terkelola dengan baik. Investasi akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan apabila mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, pertumbuhan ini akan dapat tercapai apabila investasi dapat merata di segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya yang mendukung pemerataan dan kemajuan ekonomi wilayah (Sutrisna, 2018).



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1. 3 Data PMDN Provinsi di Pulau Jawa dan Bali  
Tahun 2020-2022 (Miliar Rupiah)**

Semakin tingginya nilai investasi di suatu daerah seharusnya akan mendongkrak ekonomi sehingga menekan angka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Pada gambar 1.3 PMDN provinsi DKI Jakarta tahun 2022 mencapai nilai tertinggi yaitu Rp 89 Triliun. Berbeda dengan DKI Jakarta, PMDN provinsi DI Yogyakarta pada tahun yang sama hanya senilai Rp 2,2 Triliun. Begitupun terjadi pada provinsi Bali hanya terdapat PMDN senilai Rp 6 Triliun. Meskipun cukup tinggi dalam penyerapan tenaga kerja di provinsi Yogyakarta dan



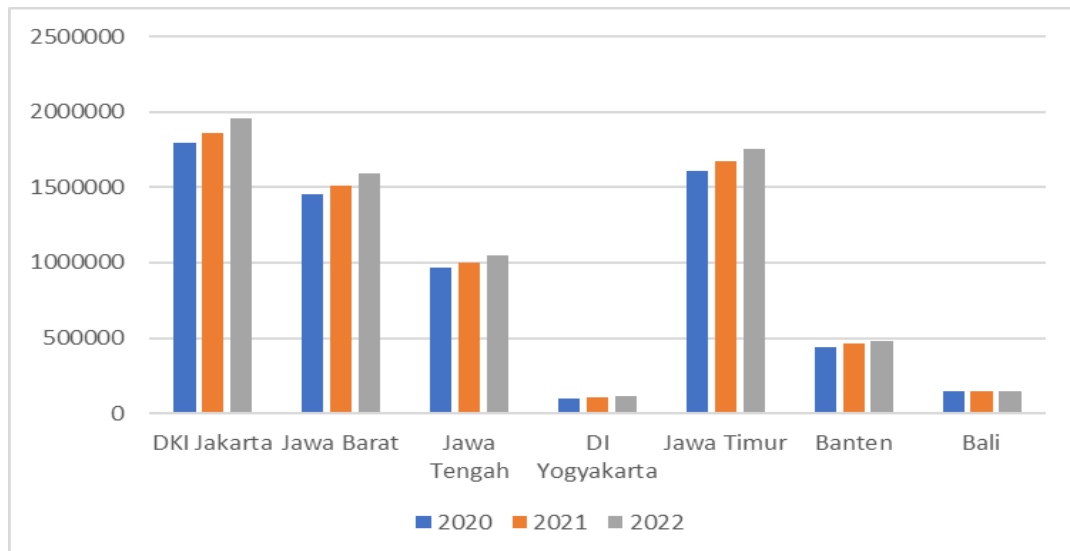
provinsi Bali tetapi tidak membuat nilai PMDN nya besar karena pada dasarnya banyak faktor yang menentukan dimana seorang investor akan menanamkan modalnya.

Berikut beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh PMDN terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya (Ferry, 2023) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berpengaruh negatif tidak signifikan antara PMDN dan ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian (Sutrisna, 2018) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PMDN dengan Ketimpangan pendapatan.

Selain investasi, pendapatan suatu daerah dapat berpengaruh terhadap upaya dalam menekan angka ketimpangan pendapatan. Besaran pendapatan daerah dapat menjadi modal dalam merealisasi program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dapat diukur melalui tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Mansyur et al., 2021). Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah, harus membandingkan pendapatan riil daerah yang bersangkutan dengan PDRB sebagai indikator yang digunakan.

PDRB merupakan besarnya nilai tambah bruto dari seluruh unit kegiatan usaha dalam wilayah tertentu (BPS, 2018). Semakin tinggi PDRB suatu wilayah menandakan potensi wilayah tersebut semakin besar. Hal ini berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah.

Dengan kata lain, jika pendapatan tinggi dan merata antar daerah maka ketimpangan pendapatan berkurang.



Sumber: Badan Pusat Statistik

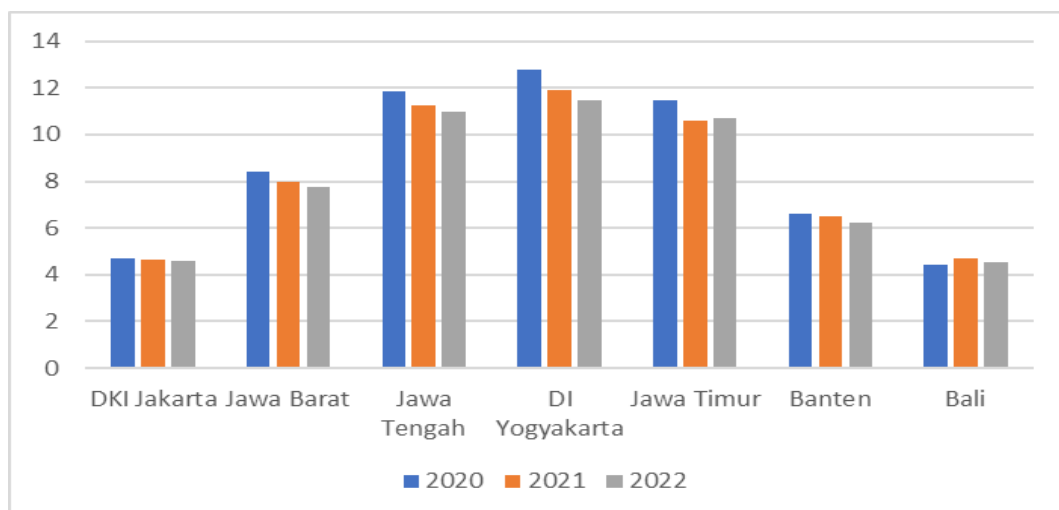
**Gambar 1. 4 Data PDRB Provinsi di Pulau Jawa dan Bali  
Tahun 2020-2022 (Miliar Rupiah)**

Berdasarkan data pada gambar 1.4 provinsi dengan PDRB tertinggi setiap tahunnya adalah DKI Jakarta karena menjadi wilayah ibu kota dan menjadi wilayah pusat perekonomian Indonesia. Kemudian disusul oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, dan terakhir Yogyakarta. Meskipun Bali dan Yogyakarta selalu menjadi wilayah tujuan utama pariwisata akan tetapi belum bisa membantu mendongkrak nilai PDRB provinsi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pendapatan terdapat beberapa perbedaan. Dalam penelitiannya (Arinda, Lorentino, 2020) menyatakan bahwa terdapat hubungan

yang berpengaruh negatif dan signifikan antara PDRB dan ketimpangan pendapatan. Hartini (2017) mengungkapkan bahwa perbedaan pendapatan suatu sektor ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan sehingga dalam penelitiannya PDRB berpengaruh positif dan signifikan.

Faktor lainnya yang menyebabkan suatu wilayah terjadi ketimpangan yaitu dapat disebabkan oleh kemiskinan. Masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah (Hartini, 2015). Variabel kemiskinan memiliki berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, karena apabila sumber daya manusianya tidak berkualitas maka akan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan yang artinya tidak memiliki pendapatan sehingga akan membuat angka ketimpangan pendapatan semakin tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

**Gambar 1.5 Data Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Jawa dan Bali  
Tahun 2020-2022 (Persen)**

Gambar 1.5 menunjukkan kemiskinan 7 provinsi dari tahun 2020-2022. Secara keseluruhan kemiskinan di 7 provinsi terjadi secara fluktuatif dan dominan mengalami penurunan setelah tahun 2020 kecuali provinsi Bali yang mengalami peningkatan ditahun 2021. Dari ketujuh provinsi tersebut, provinsi dengan kemiskinan tertinggi yaitu DI Yogyakarta, disusul Jawa tengah, Jawa timur, Jawa barat, Bali, dan terakhir Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah persentase penduduk miskin yang berangsur menurun salah satunya ialah sudah meluasnya lapangan pekerjaan yang mulai merambah ke daerah pelosok-pelosok sehingga pendapatan yang didapat mulai meningkat (Ersad et al., 2022).

Politik ekonomi untuk kesejahteraan rakyat mendapat ujian yang cukup serius pada saat ini ketika pertumbuhan ekonomi dinilai berhasil, tetapi kesejahteraan untuk rakyat bawah dipertanyakan. Ada kontradiksi didalam wacana kinerja dan kebijakan ekonomi, yakni klaim kinerja ekonomi yang “kinclong” oleh pemerintah pada satu sisi, dan masalah kemiskinan serta sektor informal yang masih luas dan buruk pada sisi lain (Rachbini, 2010). Keadaan ini berasosiasi dengan kemiskinan yang meluas dan tidak bisa diukur dengan satu kreteria garis kemiskinan (Syawie, 2017).

Dalam beberapa penelitian terdahulu terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya (Anam, 2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Syawie (2017) mengungkapkan bahwa pada proporsi tertentu, kemiskinan memang berkaitan

dengan kesenjangan. Akan tetapi, kemiskinan yang berkurang bukan berarti akan mengurangi ketimpangan. Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Determinasi Ketimpangan Pendapatan pada Provinsi di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2018-2022”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB, dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Jawa dan Bali?
2. Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB, dan kemiskinan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di Pulau Jawa dan Bali?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB, dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis penyerapan tenaga kerja, PMDN, PDRB, dan kemiskinan secara bersam-sama terhadap ketimpangan pendapatan pada Provinsi di pulau Jawa dan Bali tahun 2018-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Penulis**

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelaraskan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

### **2. Bagi Pemerintah**

Dapat menjadi bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan khususnya pada Provinsi yang berada di Pulau Jawa dan Bali.

### **3. Bagi Akademis**

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di 7 provinsi yang ada di pulau Jawa dan Bali meliputi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali.

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### 1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan November tahun 2023 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan.

### Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

[illegible]